

**PENGARUH PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) TERHADAP PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA RUMAH
TANGGA DI KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**Devi Ayu Pratiwi
NIM 13.16.4.0020**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2017**

**PENGARUH PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) TERHADAP PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA RUMAH
TANGGA DI KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**Devi Ayu Pratiwi
NIM 13.16.4.0020**

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag**
- 2. Muhammad Ilyas, S.Ag., MA**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2017

ABSTRAK

Devi Ayu Pratiwi, 2017. "Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Tangga di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara" Skripsi, Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing (1), Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag., (2) Muhammad Ilyas, S.Ag., MA.

Kata Kunci: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kesempatan Kerja

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Pengaruh pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga sasaran di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, 2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dan 3) kendala dan solusi tentang bagaimana mengatasi permasalahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga sasaran di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mix method* (metode campuran) kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis regresi linear sederhana, untuk mengetahui pengaruh variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap variabel kesempatan kerja. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder melalui studi pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan 91 responden serta dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (X) terhadap peningkatan kesempatan kerja (Y). Dibuktikan dengan lebih besarnya nilai t_{hitung} sebesar 7,332 > t_{tabel} sebesar 1,987. Koefisien regresi linear sederhana sebesar 3,775 dengan *Sig.* pada 0,000 dan memiliki sumbangan efektif sebesar 37,7%. 2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar, kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal) dan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP). 3) Permasalahan pokok dalam PNPM adalah terletak pada pengembalian pinjaman setiap bulannya ada sebagian anggota pemanfaat yang tidak mampu mengembalikan

pinjaman dengan tepat waktu atau terjadinya penunggakan pembayaran sehingga mempersulit anggota pemanfaat lainnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Hipotesis Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional Variabel.....	12
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
B. Kajian Pustaka.....	18
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitiandan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Populasi dan Sampel	36
E. Teknik Pengambilan Data Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan Data Penelitian	38
G. Analisis Data Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Sekilas Gambaran tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Bakti Usaha.....	43
B. Analisis data	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PERSURATAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel2.1	Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Berdasarkan Jumlah Desa Tertinggal	24
Tabel 2.2	Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Berdasarkan Ratio Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Di Kecamatan	25
Tabel2.3	Kriteria Rumah Tangga Sasaran	31
Tabel4.1	Karakteristik Responden BerdasarkanJenis Kelamin	44
Tabel 4.2	Tanggapan Responden Variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).....	45
Tabel 4.3	Tanggapan Responden Variabel Kesempatan Kerja	46
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).....	47
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Kesempatan Kerja	49
Tabel 4.6	<i>Reliability Statistics</i> Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).....	50
Tabel4.7	<i>Reliability Statistics</i> KesempatanKerja	50
Tabel 4.8	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	51
Tabel 4.9	Pengujian Hipotesis.....	54
Tabel 4.10	Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE).....	55

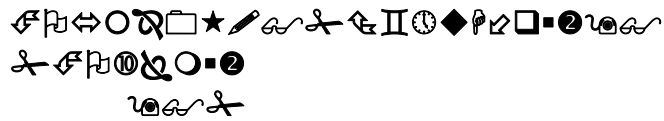


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Model Kerangka Fikir Penelitian.....	34
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi PNPM Bakti Usaha.....	43



PRAKATA



العَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ رَبِّلَّهِ الْحَمْدُ

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Tangga di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara” dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian, serta tepat pada waktunya walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. Yang merupakan suri tauladan bagi semua umat Islam selaku para pengikutnya. Serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya. Semoga kita menjadi pengikutnya yang senantiasa mengamalkan ajarannya dan meneladani akhlaknya hingga akhir hayat kita.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, dorongan, semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang teristimewa orang tua tercinta ,Ayahanda Darwis dan Ibunda Rosanna atas segala hal terbaik yang diberikan kepada penulis hingga saat ini yang tak kenal lelah memperjuangkan pendidikan anaknya hingga sampai di jenjang strata satu (S1)

dan saudara-saudariku Dian Purnama Syafitri S.Si., Dinda Sari dan Muhammad Deni Rifay yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selain itu, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, wakil Rektor I Rustan S, M.Hum., wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE., M.M., dan wakil Rektor III Dr. Hasbi, M.Ag., yang senantiasa membina di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Takdir, SH., M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Ilham, S.Ag., MA., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Dr. Fasiha, SE.I., ME.I. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
4. Seluruh dosen dan staf di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. dan Muhammad Ilyas, S.Ag., MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II; atas bimbingan, arahan,

masukan, dan motivasi serta bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dan selalu sabar dalam mengarahkan sampai skripsi ini tersusun.

6. Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku Penguji I dan Muzayyanah Jabani, ST., M.M Penguji II; atas koreksi, arahan, dan evaluasi yang diberikan kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, para pegawai dan staf perpustakaan yang telah memberikan peluang untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literature dan melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar *Economy A 13* Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terkhusus Ainun Ayu Utami, S.E., Dewi Sartika S.E., Hardianti Lukmana Hasan S.E., Hardianti S.E., Arifaeni Sidirman S.E., Arwan, S.E., Faisal, S.E., dan Iin Wulandari, S.Pd., yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan masukan kepada penulis serta kerja samanya sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Ketua PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Sabbang serta staf yang telah bersedia membagi informasi dan meluangkan waktunya kepada penulis sehingga penelitian dapat terselesaikan.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan pahala atas bantuan yang telah diberikan dan memperhitungkan amal baik kita sebagai amal jariah.

Akhirnya, penulismenyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. semata. Semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Āmin yārabb al-‘ālamīn.

Palopo, Februari 2017

Devi Ayu Pratiwi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Banyaknya organisasi ekonomi yang berkembang dimasyarakat dan dilaksanakan demi kepentingan bersama, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang merupakan salah satu kebijakan dimasa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi di daerah-daerah yang memerlukan pembangunan khususnya di desa-desa yang belum tersentuh oleh pembangunan, melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.¹

Kemiskinan masih menjadi persoalan di Indonesia, secara ekonomi penduduk miskin yang tinggi akan mengurangi keuntungan ekonomi, karena setiap persen keuntungan ekonomi akan habis untuk membiayai penduduk ini. Memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

¹Hendro M. Pinaria, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara)*, h. 2

dan keadilan sosial.²Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan yang adil dan makmur. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan dapat dilakukan melalui upaya penanggulangnya³Untuk itu diperlukannya usaha dan langka-langka untuk mempersiapkan masyarakat agar kita mampu mewujudkan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke empat dalam hal mensejahterakan masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.⁴ Tujuan utama dari PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan, masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, dan diharapkan upaya

²Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

³Liyana Apriyanti, *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Tahun 2008-2010)*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang), h.1

⁴Siaga Basu Murbeng dkk, *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)* (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawija) *Jurnal Admistrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.5, h.1261

penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kemandirian berarti mampu mengorganisasi diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya dan mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelebagaan sistem pembangunan partisipatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.⁵

Dalam rangka mencapai visi dan misi Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, strategi yang dikembangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipasi, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antara desa.⁶

Menurut Teguh Kurniawan (2009) dalam Y. Sarsetyono terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang mengangkat isu mengenai diperlukannya rasa saling percaya antara administrator publik dengan warga negara masyarakat guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi

⁵Visi Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

publik.⁷Pemberdayaan masyarakat ialah usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat bawah yang dalam kondisi atau keadaan yang tidak mampu untuk terlepas dari kemiskinan atau keterbelakangan, dapat dikatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ialah memampukan masyarakat yang tidak mampu dan memandirikannya.Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras dan bertanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya program ini.

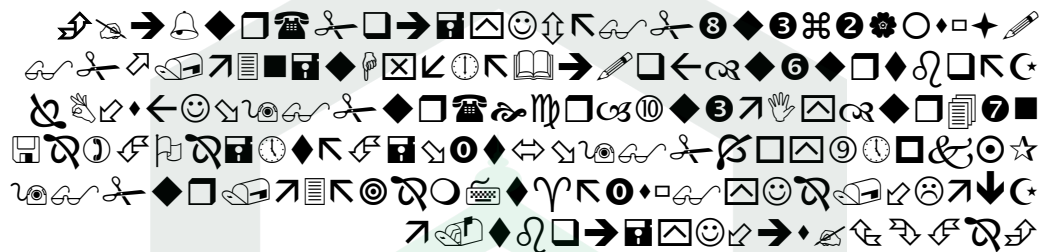
Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan mulai dari memberikan dana bantuan langsung tunai untuk rakyat yang membutuhkan sampai mengadakan program-program yang berbasis pemberdayaan dan salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini, diharapkan dengan adanya program yang diadakan pemerintah ini bukan hanya sekedar memberikan bantuan tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia lebih cenderung pasrah dan mengandalkan bantuan dari pemerintah. Hal ini membuat masyarakat lebih malas dan lebih suka menerima dari pada memberi,sama halnya dengan lebih suka mencari pekerjaan dari pada membangun usaha sendiri.⁸

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

⁷Y. Sarsetyono, *Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Masyarakat Semakin Sejahtera di Jawa Tengah*, Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyatan, Volume: XXI, No: 1, Maret 2014, (Semarang : Fakultas PTK Veteran Semarang), h.105

⁸Imam Wahyudi Raharjo, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bagi Keluarga Miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang), h. 2

dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin yang diwujudkan melalui bekerja untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar wajib dilakukan untuk meraih kesejahteraan setiap individu, dalam keluarga, dalam masyarakat dan dalam suatu Negeri, yang sesuai dengan Q. S. At-Taubah/ 9: 105.



Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.⁹

Arti ayat di atas mengungkapkan bahwa Allah swt menyeruh kepada manusia senantiasa bekerja dan ayat ini juga menjelaskan bahwa apa yang diusahakan dengan baik akan menuai keberhasilan, bukan hanya di dunia tetapi juga akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Sehingga dalam setiap usaha yang dilakukan harus benar-benar efektif dan dilakukan dengan baik agar mendapat keberhasilan dan pahala di sisi-Nya.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art.,2010), h.203

Sebagaimana sabda Rasulullah saw;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا
الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

Artinya:

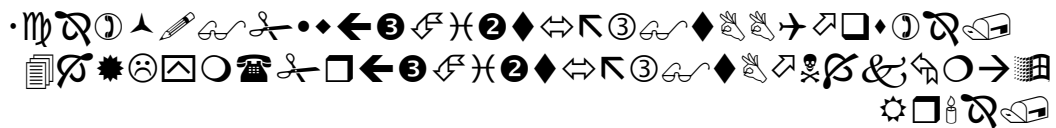
“Dari Anas bin Malik dia berkata: ada dua orang lelaki bersaudara pada masa Nabi Shalallahu’alaihi wa Salam, salah satunya datang kepada Nabi Shalallahu’alaihi wa Salam (maksudnya untuk memburu ilmu) dan yang satunya lagi bekerja, maka saudaranya yang bekerja mengadukan perihal saudaranya kepada Nabi Shalallahu’alaihi wa Salam, beliau menjawab “Bisa jadi kamu diberi rizki karena dia”.¹⁰

Diantara makna kemanusiaan yang paling menonjol dalam ekonomi Islam adalah peranannya dalam mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Islam dengan sistem ekonominya telah mendorong manusia untuk bekerja dan aktif berbuat, bahkan memandangnya sebagai ibadah dan jihad. Tetapi dibalik aktivitas itu semua terdapat tujuan kemanusiaan, yaitu merealisasikan kehidupan yang baik bagi manusia.¹¹ Tidak aneh, manusia mengharapakan kehidupan yang layak dan sejahtera, karena sesungguhnya hal itu telah dijadikan Allah sebagai balasan bagi orang yang beriman dan istiqomah dari setiap hamba-nya.

¹⁰Sunan Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Kitab Zuhud*, (Bairat-Libanon : Darul Fikri, 1994 M, Juz 4, No2352). h.154

¹¹Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta : Robbani Press, 2001), h.66

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses, yang sesuai dengan Q. S. Ar-Ra'd/ 13: 11:



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri”.¹²

Terjemahan dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt tidak akan mengubah keadaan kita selama kita tidak berusaha merubah keadaan kita sendiri, dengan kata lain Allah swt tidak akan memberikan suatu keberhasilan atau kesuksesan terhadap apa yang dilakukan ketika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sebuah keberhasilan.

Pemberdayaan sebagai suatu proses dapat dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya.¹³ Disamping itu terlepas dari kemiskinan yang merupakan impian dari semua orang, kemiskinan tidak dapat dihilangkan melainkan hanya dapat dikurangi, oleh sebab itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) hadir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja sehingga mengurangi pengangguran dan dapat mengentaskan kemiskinan khususnya

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art.,2010), h.250

¹³Bachtiar Rifa'i, *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 – 341X Volume 1, Nomor 1, Januari 2013, (Surabaya: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga), h.133

didaerah-daerah pedesaan. Permasalahan ini cukup luas sehingga membutuhkan partisipasi semua pihak baik dari pemerintah, pengurus, anggota maupun masyarakat secara bersama sama, dan diharapkan program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat.¹⁴

Berbagai strategi telah dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, ini ditunjukkan dengan masih banyaknya penduduk miskin Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis dan keadaan lingkungan. Indonesia memiliki persoalan kemiskinan yang sangat serius dan berimbas pada pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, atau pendidikan minim yang tidak memenuhi standar untuk bersaing dengan masyarakat lain. Penanganan permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian pemerintah di Negara manapun. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan dan objek pasif penerima pelayanan saja, melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya, namun kegagalan tetap saja terjadi dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih belum merata karena masih banyak ditemukan rumah tangga yang tergolong miskin.

¹⁴Sukidjo, *Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan pada PNPM-Mandiri*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang)

Sebagaimana dengan lembaga-lembaga lain meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat merupakan salah satu impian keberhasilan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), melalui peningkatan tersebut dapat mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya upaya pengentasan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.¹⁵Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), kemudian mengangkatnya dalam sebuah tulisan yang berjudul **“Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Tangga di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini dengan berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan adalah:

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

¹⁵Imam Wahyudi Raharjo, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bagi Keluarga Miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang), h. 5

3. Apakendala dan solusi permasalahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul.

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Masing-masing hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

H_a : Terdapat pengaruh positif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi tentang bagaimana mengatasi permasalahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

E. *Manfaat Penelitian*

Manfaat penelitian yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa atau peneliti lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai kebijakan pemerintah khususnya tentang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada pengembangan ilmu administrasi publik, Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi penting bagi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sendiri agar kedepannya bisa menjadi lebih baik.
2. Secara praktis penelitian ini menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 dan menjadi pengalaman pribadi yang sangat berharga bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, masukan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program yang diadakan oleh pemerintah, dan penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi PNPM agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian di dalam pelaksanaan program tahunan anggaran berikutnya, Selain itu penelitian ini menjadi masukan serta informasi penting bagi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk melihat seberapa efektif sebuah Program Pemerintah demi meningkatkan kesempatan kerja rumah tangga sasaran dan meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya penelitian ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dapat meningkatkan kesempatan kerja para anggotanya dengan solusi yang didapatkan dan diberikan oleh peneliti agar dapat mencapai keberhasilannya semaksimal mungkin dan meningkatkan kemajuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

F. *Definisi Operasional Variabel*

Untuk menghindari kesalahan persepsi dari penelitian yang berjudul “*Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Tangga di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*”, maka peneliti perlu menyertakan definisi operasional variabel:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di pedesaan dengan menyediakan fasilitas pemberdayaan/kelembagaan lokal, pendamping, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM).

Indikator efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam penelitian ini adalah:

a. Kemampuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Usaha yang dilakukan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kepada para anggotanya dalam meningkatkan kualitas kinerja anggotanya melalui program-program pelatihan, pendidikan atau pemberdayaan.

b. Kemampuan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mendukung PNPM-Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para anggotanya dalam mendukung keberhasilan PNPM.

c. Kemampuan memperluas kesempatan kerja

Dengan adanya program pemerintah ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran.

d. Kemampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Program ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dengan bantuan-bantuan yang diberikan.

2. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja atau adanya permintaan atau penawaran kerja. Indikator kesempatan kerja dalam penelitian ini adalah:

a. Laju pertumbuhan investasi

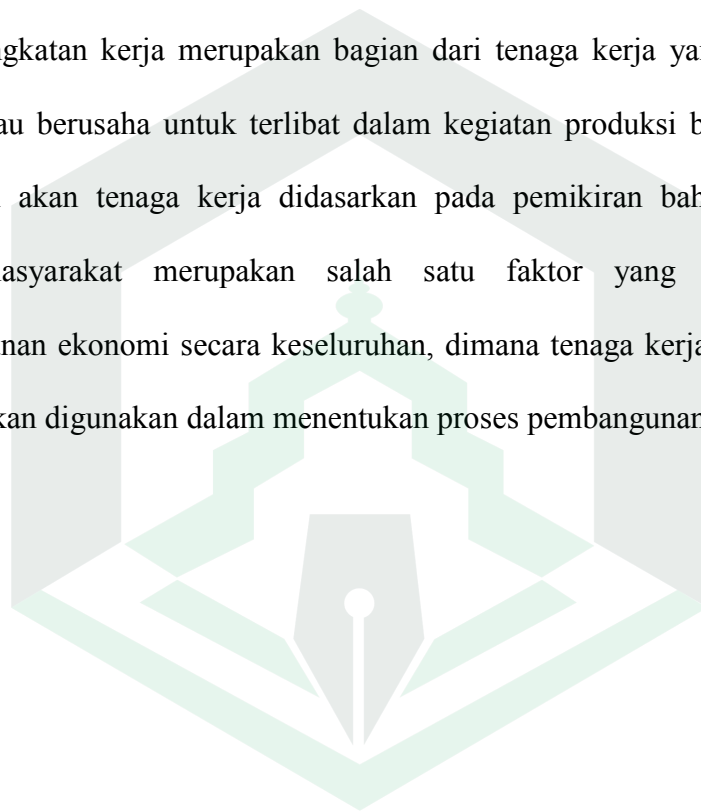
Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya dapat menciptakan serta meningkatkan permintaan dipasar.

b. Laju pertumbuhan penduduk

Banyaknya peluang atau kesempatan kerja yang terisi dapat tercermin dari besarnya jumlah penduduk yang bekerja, sehingga laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dikatakan dapat menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

c. Angkatan kerja

Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang atau jasa . kebutuhan akan tenaga kerja didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dimana tenaga kerja yang berpotensi tersebut akan digunakan dalam menentukan proses pembangunan ekonomi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. I Gusti Putu Putra dkk dalam penelitiannya yang berjudul “*Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Mpd) terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung*” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung tergolong sangat efektif karena pendapatan dan kesempatan kerja rumah sasaran menunjukkan hasil yang signifikan, pendapatan sebelum dan sesudah program mengalami peningkatan dan jumlah jam kerja rata-rata perhari sebelum dan sesudah program juga mengalami peningkatan.¹ Pemerintah diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rasa memiliki masyarakat terhadap program dengan cara ikut melakukan pemantauan dan pengawasan partisipatif masyarakat secara objektif terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat dan dampak positif secara berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat.²

¹I GustiPutu Putra, *Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan (PNPM-MPd) terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udana,4.03 (2015):183-196 ISSN : 2447-3067*, (Badung: Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana), h.1

²I Gusti Putu Putra, *Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, h.193

2. I Putu Agus AdiMarantika dkk dalam penelitiannya yang berjudul "*Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap Pendapatan dan Kesempatan kerja di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan*" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pemberian bantuan program SPP Perguliran kepada RTM di Kecamatan Kediri adalah sangat efektif terdapat perbedaan pendapatan dan kesempatan kerja RTM di Kecamatan Kediri setelah menerima program SPP perguliran, ditunjukkan dengan pendapatan dan kesempatan kerja RTM di Kecamatan Kediri meningkat secara signifikan.³

3. I Made Oka Wirawan dalam penelitiannya yang berjudul "*Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Kerambitan*" mengemukakan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga miskin di Kecamatan Kerambitan menunjukkan efektifitas pelaksanaan pelaksanaan program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam upaya peningkatan RTM tergolong cukup efektif yaitu sebesar 83,42%.⁴

³I Putu Agus Adi Marantika dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Volume 3, Nomor 12, Desember 2014: 594-602 ISSN: 2303-0178, (Kediri: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana), h.601

⁴I Made Oka Wirawan, *Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Kerambitan*, Jurnal Volume 5, Nomor 1 Tahun 2015, (Singaraja: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia), h.1

4. Hendro M. Pinaria dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara)”* menyatakan bahwa implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dapat dikategorikan baik walaupun masih banyak kelemahan seperti sumber daya manusia yang ada dikelompok pelaksana desa kolongan sebagai pelaksana kegiatan dari segi kuantitas masih kurang mencukupi selain itu juga, sumber daya manusia badan pengawas masih rendah sehingga badan ini kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.⁵

5. Mita Eriasti dalam penelitiannya yang berjudul *“Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Gajah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”* menyatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilihat dari tanggapan masyarakat yang baik pada program ini, karena memberikan pinjaman untuk mengatasi kekurangan modal dari usaha yang mereka ajalari, serta bila ditinjau dari tinjauan ekonomi islam program ini baik,

⁵Hendro M. Pinaria, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara)*, h.10

Karena di dalamnya ada unsur tolong menolong antara sesama manusia, yang mana di dalam Islam tolong menolong dalam kebaikan sangat dianjurkan.⁶

Setelah mencermati penelitian terdahulu di atas, makadapat diketahui bahwa penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, diantaranya; ada yang mengkaji Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja, kemudian ada yang meneliti tentang Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, ada juga meneliti tentang Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) dalam meningkatkan kesejahteraan, sedangkan penelitian yang dilakukan ini hanya berfokus kepada Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja. Di samping itu, perbedaan kedua dalam hal ini masalah lokasi penelitian, yaitu penelitian ini khusus dilakukan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) “Bakti Usaha” di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

B. Kajian Pustaka

1. Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM)

Menurut petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat tahun 2008, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran yang berbasis pada partisipasi dan pemberdayaan

⁶Mita Eriasti, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Gajah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), h.2

masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat upaya mengentaskan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan.⁷

Usaha dari Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan salah satu pekerjaan yang baik yang berdasarkan dengan asas kekeluargaan bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong untuk mencapai keberhasilan setiap anggotanya (kemaslahatan ummat). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara perorangan atau pun berkelompok dalam memecahkan berbagai masalah terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.⁸

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Pemerintah juga berupaya agar dengan disalurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini, masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

⁷Bram Christanto, *Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN : 2302-2752, Volume 4, Nomor 3, 2015 (Semarang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Semarang), h.124

⁸Widjaya Santosa, *Perbandingan Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten*, (Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta), h.43

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tidak hanya berkisar pada individu miskin saja, melainkan juga menganggarkan dananya untuk infrastruktur seperti jalan desa dan program fisik lainnya agar masyarakat lebih mudah dan dapat terjangkau dengan baik. Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), diharapkan individu miskin memiliki kekuatan dalam memberdayakan kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Presiden mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena program ini langsung dari usulan masyarakat sehingga lebih cepat dan lebih baik. Fokus utama pemerintah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah mengentaskan kemiskinan dengan metode pembangunan yang partisipatif dari masyarakat.

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Melalui pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran serta sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Program pemberdayaan masyarakat ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan baik yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)⁹, sumbangan masyarakat, dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, serta sumber dana yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰ melalui beberapa kegiatan diantaranya perbaikan lingkungan dan perumahan masyarakat yang membutuhkan, pengembangan usaha ekonomi desa/usaha kecil menengah, atau program-program yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. PNPM-Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendamping dan pendanaan yang untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja Rumah Tangga Sasaran di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.¹¹

Sedangkan tujuan khusus dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ialah:

⁹Laporan Koordinasi Program-Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2013

¹⁰Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 36

¹¹I Gusti Putu Putra, *Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4.03 (2015):183-196 ISSN : 2447-3067, (Badung: Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, h.37

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan,
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel,
- c. Meningkatkan sinergi masyarakat,
- d. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal,
- e. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.¹²

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diproyeksikan dapat menyentuh sekitar 16 juta orang miskin di seluruh Indonesia dengan jumlah dana hibah sekitar Rp 3 milyar per kecamatan, maka diharapkan antara 20-26 juta orang miskin mendapatkan pekerjaan dan sekaligus penghasilan.¹³ Jika dana hibah yang dipatok untuk setiap kecamatan sebesar Rp 1,5 milyar, maka masyarakat miskin yang mendapat pekerjaan dan penghasilan berkisar antara 10-16 juta orang sampai pada akhir program.

¹²Darma Jasuli dkk, *Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan PNPM-MP di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)*, (Bandung), h.5

¹³Widjaya Santosa, *Perbandingan Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten*, (Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta), h.47

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) secara nasional melalui dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran
- b. Berdampak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan
- c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
- d. Didukung oleh sumber daya yang ada
- e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal)
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)

Besarnya alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

a. Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal

Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka alokasi (Bantuan Langsung Masyarakat) BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal yang ada di Kecamatan tersebut. Data desa tertinggal merujuk pada data yang ditetapkan oleh kementerian pembangunan daerah tertinggal. Alokasi BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1. : Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Berdasarkan Jumlah Desa Tertinggal

Jumlah Desa Tertinggal	Alokasi BLM (Rupiah)
≤ 3	1.000.000.000
4	1.250.000.000
5	1.500.000.000
6	1.500.000.000
7	1.750.000.000
8	2.000.000.000
9	2.250.000.000
10	2.250.000.000
11	2.750.000.000
≥ 12	3.000.000.000

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

b. Alokasi berdasarkan ratio penduduk miskin dan jumlah penduduk di kecamatan

Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal yang telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.2. : Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Berdasarkan Ratio Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk di Kecamatan

Lokasi	Jumlah Penduduk	Persen (%) Penduduk Miskin	Alokasi BLM (Rupiah)
Jawa	< 25.000	<=40%	1.500.000.000
		>40%	1.750.000.000
	25.000-50.000	<=40%	1.750.000.000
		>40%	2.000.000.000
	>50.000	<20%	2.250000.000
		20% sd 40%	2.500.000.000
>40%		3.000.000.000	
Luar Jawa	<15.000	<=40%	1.500.000.000
		>40%	1.750.000.000
	15.000-25.000	<=40%	1.750.000.000
		>40%	2.000.000.000
	>25.000	<20%	2.250000.000
		20% sd 40%	2.500.000.000
>40%		3.000.000.000	

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

Sesuai dengan pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mempunyai prinsip atau nilai-nilai yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Prinsip-prinsip pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata
- b. Berorientasi pada masyarakat miskin adalah semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rumah tangga sasaran dan kelompok yang kurang beruntung

- c. Partisipasi adalah masyarakat berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga pikiran maupun materiil
- d. Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan wewenang mengatur diri sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa intervensinegatif dari luar
- e. Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelolah kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap program dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- g. Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tahap berorientasi kepada kepentingan masyarakat miskin
- h. Keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Efektivitas diartikan sebagai pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya, Efektivitas adalah kesesuaian antara

output dengan tujuan yang telah ditetapkan, tingkat efektivitas program dalam hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila rasio efektivitas 1-50 persen maka termasuk dalam efektivitas rendah dan apabila rasio efektivitas 51-100 persen termasuk efektivitas tinggi.

2. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam melakukan suatu pekerjaan dalam menghasilkan pendapatan. Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau disebut pula pekerja.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh masyarakat dan untuk memperluas kesempatan kerja diperlukan modal.

Besarnya kesempatan kerja tergantung pada beberapa faktor diantaranya pertumbuhan output, tingkat upah, dan harga-harga dari faktor produksi lainnya. Hubungan antara pertumbuhan output dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja dapat digambarkan melalui hubungan antara pasar barang dan pasar tenaga kerja, dimana melalui mekanisme pasar terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran dipasar tenaga kerja, rumah tangga menawarkan jasanya dan mendapatkan harga (gaji). Permintaan konsumsi rumah tangga dipasar barang meningkat, maka produksi dari sisi penawaran pasar barang meningkat dan

terjadilah pertumbuhan output dan bila terjadi peningkatan output di semua pasar, maka secara agregat terjadi pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan kesempatan kerja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mendorong masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan.¹⁴ Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu negara karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, sumber daya alam dan kewiraswastaan. Tetapi banyaknya tenaga kerja juga dapat menimbulkan masalah yaitu masalah perluasan kesempatan kerja, pendidikan yang dimiliki oleh angkatan kerja dan pengangguran.

Kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu:

- a. Kesempatan kerja permanen yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalnya adalah orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang memiliki jaminan sosial hingga hari tua dan tidak bekerja ditempat lain.
- b. Kesempatan kerja temporer yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan seseorang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Misalnya adalah orang yang bekerja

¹⁴I Made Oka Wirawan, *Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Kerambitan, Jurnal Volume 5, Nomor 1 Tahun 2015*, (Singaraja: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia), h.3

sebagai pegawai lepas pada perusahaan swasta dimana pekerja mereka tergantung order.¹⁵

Usaha perluasan kesempatan kerja bersifat umum:

- a) Penyediaan dana kredit secara meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya
- b) Tingkat kurs devisa diharapkan agar realistis dan memberikan insentif bagi peningkatan ekspor
- c) Memberikan perlindungan yang wajar kepada produksi dalam Negeri
- d) Pengeluaran pemerintah ditunjukkan untuk memperluas kesempatan kerja produktif sebanyak mungkin.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja atau angkatan kerja adalah sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung pada komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk

¹⁵Anggi Wahyu Pratama, *Kesempatan Kerja*, Blog <http://youcanseemine.blogspot.co.id/2013/04/kesempatan-kerja.html>, (Akses Senin 05 September 2016)

golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya jumlah penduduk yang banyak tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan.

3. Rumah Tangga Sasaran

Rumah tangga sasaran adalah rumah tangga yang tergolong miskin, miskin dan dekat dengan miskin. Data rumah tangga sasaran (RTS) ini sering disebut data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus guna memberikan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin berada. Pengumpulan data rumah tangga sasaran didasarkan pada kriteria rumah tangga sasaran yang diperoleh dari survei kemiskinan seperti pada tabel:

Tabel 2.3. Kriteria Rumah Tangga Sasaran

No	Variabel	Kriteria
1	Luas lantai per kapita	<8 m ²
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu/papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat buang air	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam	Tidak

	seminggu	
10	Kemampuan membeli pakaian baru	Tidak
11	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak
12	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani/pekebun
13	Pendidikan kepala rumah tangga	Belum pernah sekolah/tidak
14	Kepemilikan aset/ barang berharga minimal Rp.500.000	Tidak ada

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

Secara konseptual rumah tangga sasaran adalah rumah tangga yang memenuhi minimal kriteria 9 kriteria dari 14 kriteria miskin yang telah disepakati dan ditetapkan. Rumah tangga sasaran terdiri dari tiga kelompok yaitu rumah tangga sangat miskin (memenuhi 13-14 kriteria), rumah tangga sasaran miskin (memenuhi 11-12 kriteria), dan rumah tangga sasaran hampir miskin (memenuhi 9-10 kriteria). Pemenuhan variabel rumah tangga sasaran pada batas kebutuhan dasar minimal yang dinyatakan dalam ukuran garis kemiskinan yaitu jumlah yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan.

4. Solusi terhadap Permasalahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Adapun solusi yang di tawarkan oleh penulis terhadap permasalahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM):

- a. Pemerintah diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rasa memiliki masyarakat terhadap program dengan cara ikut melakukan pemantauan dan pengawasan partisipatif secara objektif terhadap hasil

kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat dan dampak positif secara berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat

- b. Peningkatan Kemandirian di dalam penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian secara partisipatif diharapkan anggota masyarakat mengetahui dan ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan maupun yang sudah selesai dilaksanakan
- c. Masyarakat diharapkan menjamin berfungsinya secara berkelanjutan dan menjaga hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa prasarana/sarana, simpan pinjam kelompok perempuan merupakan aset bagi masyarakat yang harus diawasi, dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan oleh pemerintah bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian tidak sesuai dengan harapan maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri untuk tahun berikutnya.

C. Kerangka Fikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dengan demikian kerangka pikir dengan hakikatnya menggambarkan hubungan antar variabel independen dalam hal ini adalah (X) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap variabel dependen yaitu peningkatan

kesempatan kerja (Y).

Faktor kesempatan kerja rumah tangga sasaran merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program pemberdayaan ini dapat dikatakan efektif bila dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga terciptanya kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran serta dapat mengentaskan kemiskinan. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau memampukan masyarakat yang tidak mampu dan memandirikannya. Dengan demikian diduga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berpengaruh positif terhadap peningkatan kesempatan kerja tetapi belum efektif dalam meningkatkan kesempatan kerja rumah sasaran.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas maka pengembangan kerangka pikir dapat dilihat seperti di bawah ini:

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah Berdasarkan Kerangka Pikir Penulis

Upaya meningkatkan kesempatan kerja rumah tangga sasaran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini, dirasakan masih menemui berbagai kendala dalam menuntaskan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Sehingga munculnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang diharapkan mampu memberikan perubahan kondisi melalui sistem pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan dapat dilihat dari efektifnya pelaksanaan program yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu, tingkat efektifitas dan dampak pelaksanaan program tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mixed methods*, Creswell dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa “*Mixed Methods Research is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative from of research*” Metode kombinasi adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.¹ karena menyajikan hasil penelitian dengan angka-angka untuk melihat bagaimana pengaruh variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan Kesempatan Kerja Rumah di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Serta menggunakan deskriptif karena peneliti bertujuan untuk menggambarkan kondisi variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Sasaran.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Bakti Usaha di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada bulan Januari-Februari tahun 2017.

¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (*Mixed Methods*), (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 19.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini dapat memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dalam penelitian ini.

Berdasarkan sumbernya data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.² Data primer diperoleh dari responden yang terdiri dari anggota dan pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan datanya kepada pengumpul data, data sekunder berasal dari arsip-arsip, laporan-laporan dari instansi terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan semua informasi yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

D. Populasi dan Sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan kemudian diseleksi menjadi sampel untuk penelitian ini. Didalam penelitian ini populasi penelitian adalah pengurus maupun anggota dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Pada

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung : Alfabeta, 2009, h.225.

penelitian ini populasi yang diambil berukuran besar dengan jumlah populasi 1.013 orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian, karena keberadaannya merupakan bagian dari populasi. Dengan menggunakan rumus Slovin dengan derajat kesalahan (α) 10 persen sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Keterangan:

N = Jumlah anggota dalam populasi

n = Jumlah sample

e = Derajat penyimpanan yang ditoleransi 10 %

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

$$n = \frac{1.013}{1 + (1.013 \cdot 0,1^2)}$$

$$n = \frac{1.013}{1 + (1.013 \cdot 0,01)}$$

$$n = \frac{1.013}{11.13}$$

n = 91 sample

Dari jumlah sample yang didapat 91 responden kemudian dilakukan teknik sampling dengan teknik *Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sample yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sample.

E. Teknik Pengambilan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan teknik metode angket/kuisisioner yang disebar/dibagikan ke 91 sampel yang telah diambil dari populasi. Kuesioner yang diisi memuat pertanyaan yang memuat mengenai poin-poin penting tentang efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga sasaran di Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara. Kuesioner yang diisi memuat pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh informasi, Kemudian metode *Library research* yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature buku yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah, serta melakukan wawancara yang dilakukan khusus terhadap beberapa responden dengan menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur sehingga akan diketahui kondisi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara.

F. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Pengolahan data untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan yaitu: 1) *Editing* yaitu proses pengecekan atau pemeriksaan data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. 2) *Codeting* adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama, kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau

identitas data yang akan dianalisis. 3) *Tabulasi* yaitu proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis, tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.

G. Analisis Data Penelitian

1. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.

2. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan mengenai efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan rumah tangga sasaran.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (*independent*) dan satu variabel tak bebas (*dependent*).³ Tujuan penerapan metode ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas (*dependent*) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent*).

³Syifian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Cet. II; Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), h.379

Regresi linear sederhana dihitung dengan rumus:

$$Y = a + b \cdot X$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat → Kesempatan kerja

X = Variabel bebas → PNPM

a dan b = konstanta

4. Uji Validitas dan Uji Reabilitas Instrumen Penelitian (Angket)

a. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan *content validity* yang dapat menggambarkan kesesuaian sebuah pengukuran data dengan apa yang diukur.⁴ Jika suatu indikator mempunyai korelasi antara skor masing-masing indikator terhadap skor totalnya (skor variabel konstruk) dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment* maka dikatakan indikator tersebut valid.

b. Uji Reabilitas Instrumen

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau

⁴Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006), h.65.

pengukuran sekali saja. Di sini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpa (α) suatu variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpa (α) $> 0,6$.⁵

5. Uji Parsial (Uji t)

Untuk menentukan koefisien spesifik yang mana yang tidak sama dengan nol, uji tambahan diperlukan yaitu dengan menggunakan uji t. uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: a) Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. b) Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pengolahan data untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan yaitu: 1) *Editing* yaitu proses pengecekan atau pemeriksaan data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. 2) *Codeting* adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama, kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis. 3) *Tabulasi* yaitu proses penempatan data ke

⁵Iman Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005), h.70.

dalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis, tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Bakti Usaha

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Bakti Usahaberalamatkan di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Sabbang yang terletak di ujung sebelah barat dengan luas wilayah sekitar 525,08 Km², Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu di sebelah barat sedangkan batas sebelah utara adalah Kecamatan Limbong, serta batas sebelah timur dan selatan adalah Kecamatan Baebunta. Kecamatan Sabbang terdiri dari 20 desa/kelurahan yaitu desa Bakka, Batu Alang, Bone Subur, Buangin, Buntu Terpedo, Dandang, Kalotok, Kampung Baru, Malimbu, Mari-Mari, Marobo, Pararra, Pengkendekan, Pompaniki, Sabbang, Salama, Tandung, Terpedo Jaya, Tete Uri, dan Tulak Tallu. Desa yang paling luas wilayahnya adalah desa Pararra dengan luas 99,69 Km² atau meliputi 18,99 persen luas Kecamatan Sabbang dan desa yang paling sempit wilayahnya adalah desa Batu Alang dengan luas wilayah 4,11 Km². Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sabbang masih tergolong rendah, dengan luas wilayah 525,08 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 37.224 orang.¹

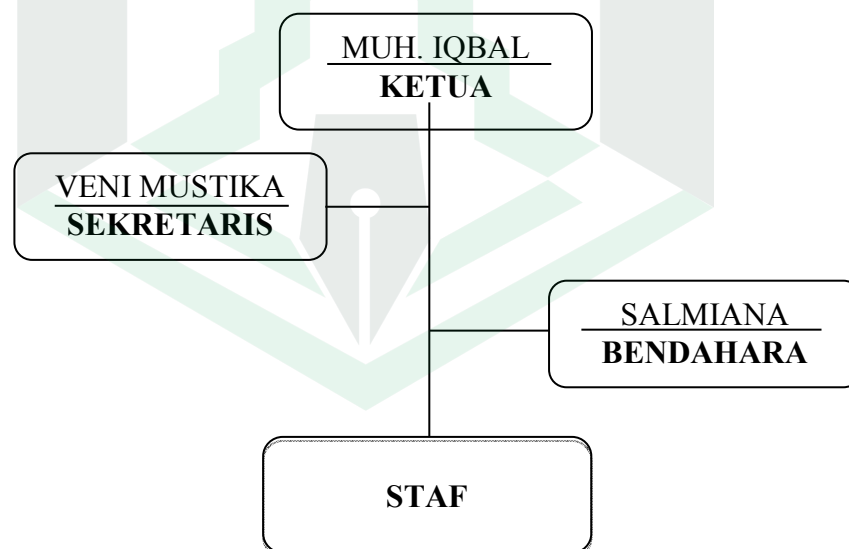
Pemanfaatan dan peresmiannya pada tanggal 15 Oktober 2009 oleh mantan Bupati Luwu Utara H.M. Luthfi A. Mutty. Tujuan utamanya

¹Dokumentasi Kantor Kecamatan Sabbang, 2017

meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja rumah tangga sasaran dimana pendanaannya dibiayai dari APBN dan APBD, tahun anggaran 2016 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 3.103.000.000,- melalui beberapa kegiatan diantaranya perbaikan lingkungan dan perumahan masyarakat yang membutuhkan seperti bedah rumah, pembangunan gedung TK, pengkerikilan jalan, jembatan gantung, sarana air bersih, drainase, dan lain-lain serta pengembangan usaha ekonomi desa melalui SPP (Simpan Pinjam Perempuan) 60 kelompok dengan 480 anggota pemanfaat dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) 104 kelompok dengan 832 anggota pemanfaat.²

2. Struktur Organisasi PNPM “Bakti Usaha”

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PNPM “Bakti Usaha”



Sumber : Dokumentasi kantor PNPM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) “Bakti Usaha” Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

²Salmiana, Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) “Bakti Usaha” Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

3. Analisis Deskriptif

a. Karakteristik identitas responden

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	19	21%
2.	perempuan	72	79%
	Total	91	100%

Sumber : Data kuesioner yang diolah 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebanyak 91 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang atau 21% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 72 orang atau 79%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota pemanfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu berjenis kelamin perempuan.

b. Deskripsi Tanggapan Responden

1) Variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) X

Tabel 4.2. Tanggapan Responden Variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

No	Pernyataan	Jawaban Responden					TOTAL
		SS	S	RR	TS	STS	
1.	Keberadaan Kepala Desa dalam pelaksanaan program PNPM	68 74,8%	23 25,3%	0	0	0	91 100%
2.	Keputusan Kepala Desa dalam pelaksanaan program PNPM	70 76,9%	21 23,1%	0	0	0	91 100%
3.	Peran perangkat desa	67 73,7%	34 37,4%	0	0	0	91 100%
4.	Peran musyawarah	57 62,6%	32 35,2%	0	0	0	91 100%
5.	Berlaku adilkah Kepala Desa dalam pelaksanaan program PNPM	66 72,5%	22 24,2%	3 3,3%	0	0	91 100%
6.	Pengetahuan mengenai PNPM	88 96,7%	11 12,1%	0	0	0	91 100%
7.	Disiplin dalam pelaksanaan program	83 91,2%	7 7,8%	1 1,1%	0	0	91 100%
8.	Pengaruh PNPM bagi masyarakat miskin	85 93,4%	5 5,5%	1 1,1%	0	0	91 100%
9.	Pemerintah dalam mensosialisasikan PNPM	75 82,4%	16 17,6%	0	0	0	91 100%
10.	Program PNPM menjadi program pemerintah dalam mengentskan kemiskinan	86 94,5%	5 5,5%	0	0	0	91 100%
11.	Kegiatan PNPM sudah berjalan sesuai dengan rencana	66 72,5%	24 26,4%	1 1,1%	0	0	91 100%

Sumber : Data kuesioner yang diolah 2017

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 91 responden rata-rata menjawab Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S).

2) Variabel Kesempatan Kerja

Tabel 4.3. Tanggapan Responden Variabel Kesempatan Kerja

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Total
		SS	S	RR	TS	STS	
1.	Setela mendapat bantuan program kesempatan kerja menjadi meningkat	79 86,8%	12 13,2%	0	0	0	91 100%
2.	Setelah mendapat bantuan Program Pendapatan masyarakat meningkat	83 91,2	8 8,8%	0	0	0	91 100%
3.	Jumlah pengangguran berkurang	81 89,0%	9 9,9%	1 1,1%	0	0	91 100%

Sumber : Data kuesioner yang diolah 2017

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa pada pernyataan 1 dari variabel Y_1 Setelahmendapatbantuan program kesempatankerjarumah tangga sasaran menjadimeningkat, dari 91 responden 79 orang atau 86,8% menjawab Sangat Setuju (SS), 12 orang atau 13,2% menjawab Setuju (S). Pernyataan nomor 2 Setelah mendapat bantuan Program Pendapatan masyarakat meningkat, dari 91 responden 83 orang atau 91,2% menjawab Sangat Setuju (SS), dan 8 orang atau 8,8% menjawab Setuju (S). Dan pernyataan nomor 3 jumlah pengangguran berkurang, dari 91 responden 81 orang atau 89,0% menjawab Sangat Setuju (SS), 9 orang atau 9,9% menjawab Setuju (S) dan 1 orang atau 1,1% menjawab Ragu-Ragu (RR)

B. Analisis data

1. Uji Instrumen

a. Uji validitas

Uji validitas akan menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variabel memuat 14 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Kriteria yang digunakan adalah bila nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) bernilai positif dan lebih besar dari r_{tabel} , berarti item dinyatakan valid. Dengan $N = 91$ dan diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,204.

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

q1	Pearson Correlation	.580**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q2	Pearson Correlation	.666**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q3	Pearson Correlation	.650**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q4	Pearson Correlation	.663**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q5	Pearson Correlation	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q6	Pearson Correlation	.581**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91

q7	Pearson Correlation	.598**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q8	Pearson Correlation	.558**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q9	Pearson Correlation	.389**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q10	Pearson Correlation	.465**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q11	Pearson Correlation	.523**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	91

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer diolah

Hasil dari uji validitas instrumen variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menunjukkan dari 11 item pertanyaan, ada memiliki r_{hitung} lebih dari r_{tabel} (0,204) dengan demikian, item yang *Valid* dalam validitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) akan digunakan dalam analisis data.

Tabel 4.5.
Hasil Uji Validitas Kesempatan Kerja

q1	Pearson Correlation	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q2	Pearson Correlation	.810**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
q3	Pearson Correlation	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	91
total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	91

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer diolah

Hasil dari uji validitas instrumen variabel Kesempatan Kerja menunjukkan bahwa dari 3 item memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,204) dengan demikian item yang *Valid* dalam validitas Kesempatan Kerja akan digunakan dalam analisis data.

b. Uji Realibilitas

Realibilitas merupakan alat yang mengukur suatu kuesioner dan merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Tabel 4.6. Reliability Statistics Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	11

Sumber: data primer diolah menggunakan *SPSS 16.0*

Berdasarkan hasil perhitungan di atas pada tabel hasil uji reliabilitas sesudah *Question Unvalid* digugurkan dapat diketahui, variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* 0,799, variabel tersebut termasuk dalam kriteria 0,70-0,90 hal ini menunjukkan bahwa instrumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) memiliki reliabilitas tinggi.

Tabel 4.7. Reliability Statistics Kesempatan Kerja

Cronbach's Alpha	N of Items
.777	3

Sumber: data primer diolah menggunakan *SPSS 16.0*

Berdasarkan hasil perhitungan di atas pada tabel hasil uji reliabilitas sesudah *Question Unvalid* digugurkan dapat diketahui, variabel Kesempatan Kerja diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* 0,777 variabel tersebut termasuk dalam kriteria 0,70-0,90 hal ini menunjukkan bahwa instrumen Kesempatan kerja memiliki reliabilitas tinggi.

2. Uji Hipotesis

a. Uji parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berpengaruh terhadap variabel Kesempatan Kerja maka digunakan uji F yaitu dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Kriteria pengujian adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Adapun dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi:

- Jika Sig. < 0,05 maka variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.
- Jika Sig. > 0,05 maka variable independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji T)

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	3.647	1.502		2.428	.017		
	x	.208	.028	.614	7.332	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: y

Sumber : Output SPSS yang diolah

Nilai signifikan T_{hitung} Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah 0,000. Diketahui besarnya nilai T_{hitung} adalah 7,332. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 di tolakdan H_a di terima, hasil analisis menunjukkan $T_{hitung} > T_{tabel}$ 7,332 > 1,987 maka, H_a diterima, yakni terdapat pengaruh dan

signifikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap kesempatan kerja dengan sumbangan efektif 37,7%, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas rendah.

3. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji Regresi Linear Sederhana dapat dituliskan kedalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y &= a + b \cdot X \\ &= 3,647 + 0,208 \cdot 0,614 \\ &= 3,647 + 0,128 \\ &= 3,775 \end{aligned}$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a = 3,647 merupakan nilai konstanta atau *reciprocal*, artinya jika variabel bebas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) memiliki nilai 0 maka nilai variabel terikat (kesempatan kerja) sebesar 3,647.
- b = 0,208 artinya apabila tanggapan responden atas variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan bertambah satu satuan, maka kesempatan kerja akan mengalami peningkatan sebesar 0,208.
- X = 0,614 artinya apabila tanggapan responden atas variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan bertambah satu satuan, maka kesempatan kerja akan mengalami peningkatan sebesar 0,614

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Tangga

Dalam definisi operasional, telah dijelaskan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dari hasil uji regresi linear sederhana dengan menggunakan beberapa uji di peroleh hasil sebagai berikut:

Pada uji instrumen digunakan uji validitas dan reabilitas. Hasil dari uji validitas dianggap memenuhi syarat kevalidannya apabila memiliki nilai *corrected item total correlation* diatas 0,30. Oleh karena itu dari hasil uji validitas variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kesempatan kerja yang seluruhnya memiliki 14 item pernyataan dinyatakan sudah valid karena memiliki nilai *corrected item total correlation* diatas 0,30. Kemudian pada uji reabilitas yang telah dilakukan dari variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kesempatan kerja telah dinyatakan *riabel* karena telah memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60 nilai *Cronbach Alpha* yang diperoleh sebesar 0,799 yang artinya tingkat reabilitasnya sangat tinggi. Maka dapat disimpulkan variabel dalam penelitian layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji-t statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Kriteria yang digunakan:

- a. Apabila nilai t hitung $\leq t$ tabel 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Apabila t hitung $> t$ tabel 0,05, maka ada pengaruh variabel independen terhadap pengaruh dependen sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berikut ini hasil uji statistic dan pengujian hipotesis satu arah pada model regresi.

Tabel 4.9. Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Hasil	Putusan
H_0	Tidak terdapat pengaruh positif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga sasaran di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.	7,332 > 1,987	Ha diterima
H_a	Terdapat pengaruh positif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga sasaran di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara		

Sumber: Data hasil koesioner diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan:

Hasil pengujian hipotesis satu arah yang menghubungkan variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (X) terhadap peningkatan kesempatan kerja (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar 7,332 dan t tabel sebesar 1,987 dan koefisien regresi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar 6,075 dengan *Sig.* pada 0,000 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga sasaran di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui besarnya Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) variabel bebas terhadap variabel terikat 37,7%.

Besarnya SR dan SE dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10. Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE)

Variabel	Sumbangan Relatif (SR)	Sumbangan Efektif (SE)
PNPM	100%	37,7%

Sumber : Output SPSS yang diolah

Pemerintah Kabupaten Luwu utara telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dengan meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan keluarga rumah tangga sasaran. Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kesempatan kerja rumah tangga sasaran melalui kuesioner dengan 91 responden, 79 responden atau 86,8% responden menjawab setelah adanya bantuan program, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat.

Dampak peningkatan kesempatan kerja rumah tangga sasaran setelah menerima bantuan program/akses telah sesuai dengan teori menyebutkan bahwa ada dua dampak utama dari pemberian kredit yaitu peningkatan pendapatan masyarakat (*income generation*) dan menciptakan peluang usaha atau peluang

kerja (*employment cration*), demikian juga telah sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh I Gusti Putu Putra yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja rumah tangga sasaran.

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya peningkatan harkat dan martabat masyarakat dalam kondisi tidak mampu. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Tujuan utama dari PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja rumah tangga sasaran dimana pendanaannya dibiayai dari APBN dan APBD, melalui beberapa kegiatan diantaranya perbaikan lingkungan dan perumahan masyarakat serta pengembangan usaha ekonomi desa melalui pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).

Jenis jenis kegiatan yang dibiayai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran

- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal)
- c. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)³

Adapun kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara adalah pembangunan jalan masuk kampung, gedung TK, penampungan air bersih, Pengadaan listrik, drainase dan pelatihan menjahit. Dalam pengalokasian program tidak jarang terjadi silang pendapat antara masyarakat, karena masyarakat menilai pengalokasian program tidak menggunakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan menurunnya rasa kepedulian masyarakat terhadap hasil program, karena masyarakat merasa terpaksa dalam melaksanakan program. Sebagian besar masyarakat yang merasa terpaksa dalam melaksanakan program adalah adalah masyarakat kurang mampu, karena mereka merasa mengalokasikan program tidak berpihak pada nasib mereka yang membutuhkan bantuan modal atau keterampilan untuk memperbaiki perekonomian mereka.

³PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

Wawancara yang dilakukan tentang bagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap pemberdayaan masyarakat di kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yakni:

- a. An. Salmiana mengatakan “banyak itu orang kalau sudah mi cair itu uang UEP atau SPP na pake lain ji itu uangnya tidak na pake bikin usaha giliran nanti mau bayar mi angsuran bulanan menunggak mi, ketua kelompoknya mi na sussai”⁴
- b. An. Nur Asia mengatakan “bagus ji itu PNPM karna na bantu ki seperti saya mi ini tidak punya ka modal tapi na bantu mika melalui UEP”⁵
- c. An. Husna mengatakan “kalau dari bantuan permodalan itu kalau dibilang tidak berpengaruh sama masyarakat, dari mereka mami itu karna kan sudah dikasi mi modal tinggal mereka mami itu berusaha sendiri, mereka mami itu tidak mau bikin usaha atau apa”⁶
- d. An. Cica Rohani mengatakan “tidak adil itu bantuan, ada itu orang bagus bang mi rumahnya, masa na kenna pi bedah rumah mungkin karena keluarganya mi pak desa itu”⁷
- e. An. Mildawati mengatakan “kalau saya bagus mi ini program karna na bantu ka, ikut to mika dulu pelatihan menjahitnya na sekarang ada pi lagi uang UEP-nya bisa ku pake berusaha”⁸

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa beberapa anggota pemanfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam hal ini penerima bantuan permodalan tidak menggunakan dana pinjaman dengan baik sehingga tidak dapat membayar angsuran dengan tepat waktu, dan dalam hal pemberian bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan adanya ketidaktepatan sasaran penerimabantuan, serta adapun responden yang mengatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah banyak membantu.

⁴Salmiana, Bendahara UPK PNPM Bakti Usaha, (Wawancara Jumat, 13 Februari 2017)

⁵ Nur Asia, Anggota Kelompok PNPM, (Wawancara Jumat, 13 Februari 2017)

⁶ Husna, Bendahara Forum BKAD, (Wawancara Jumat, 13 Februari 2017)

⁷ Cica Rohani, Anggota Kelompok PNPM, (Wawancara Jumat, 13 Februari 2017)

⁸ Mildawati, Ketua kelompok PNPM, (Wawancara Jumat, 13 Februari 2017)

3. Kendala dan Solusi Mengatasi Permasalahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Pengembangan ekonomi lokal hakikatnya merupakan proses dimana pemerintah daerah mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan pekerjaan baru untuk merangsang kegiatan ekonomi wilayah, orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Di dalam kegiatan pembangunan desa masalah akan muncul secara terus menerus dan dalam bentuk yang bermacam-macam. Penyebabnya juga berbeda sehingga diperlukan proses identifikasi masalah untuk menentukan mana yang prioritas, yang mudah dipecahkan dan sulit dipecahkan.

Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan mulai dari memberikan dana bantuan langsung tunai untuk rakyat yang membutuhkan sampai mengadakan program-program yang berbasis pemberdayaan dan salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini, diharapkan dengan adanya program yang diadakan pemerintah ini bukan hanya sekedar memberikan bantuan tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. seperti yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia lebih cenderung pasrah dan mengandalkan bantuan dari pemerintah. Hal ini membuat masyarakat lebih malas dan lebih suka menerima dari pada memberi, sama halnya dengan lebih suka mencari pekerjaan dari pada membangun usaha sendiri.

Permasalahan pokok dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah terletak pada pengembangan usaha ekonomi desa melalui

pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dimana dalam hal pengembalian pinjaman setiap bulannya ada sebagian anggota pemanfaat yang tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu atau terjadinya penunggakan pembayaran sehingga mempersulit anggota pemanfaat lainnya karena pada periode berikutnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan berfikir kembali apakah kelompok UEP (Usaha Ekonomi Produktif) tersebut masih bisa diberi pinjaman atau tidak. Permasalahan yang kedua adalah penggunaan pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang tidak tepat, hal ini terlihat dari adanya anggota pemanfaat yang tidak menggunakan dana pinjaman dengan tepat yaitu tidak menggunakan pinjaman untuk memulai usaha baru padahal idealnya pinjaman diberikan kepada orang yang membutuhkan dana/kekurangan modal dalam hal memulai usaha. Permasalahan yang ketiga adanya ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, idealnya dalam hal penerimaan bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan diberikan kepada rumah tangga sasaran yang benar-benar membutuhkan.

Pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, secara umum pengorganisasiannya tidak berjalan dengan baik, walaupun pembukuan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok lengkap yakni adanya bukti setoran dari masing-masing anggota kepada ketua kelompok dan bukti setoran kelompok kepada UPK (Unit Pengelola Kegiatan), namun dalam hal ini semua beban ada pada ketua kelompok. Sekertaris dan bendahara kurang memiliki peran karena memang

tidak mengerti untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam pelaksanaan kelompok kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, melakukan beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional seperti adanya anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bekerja sebagai PNS, hal ini menunjukkan bahwa dalam anggota kelompok masih terdapat anggota yang tidak tergolong sebagai rumah tangga miskin. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, juga jarang sekali melakukan pertemuan bersama, setelah dana dicairkan mereka sibuk mengurus urusan mereka masing-masing. Secara umum kehadiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yakni dengan adanya kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Tidak hanya anggota kelompok saja yang mendapatkan manfaat tetapi juga anggota keluarga yang lain, tidak sedikit masyarakat yang terbantu dalam meningkatkan taraf hidup keluarga walaupun ada sebagian anggota yang menyalagunakan bantuan dana tersebut. Penyalagunaan yang dimaksud yakni adanya anggota yang menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dana tersebut tidak digunakan untuk modal usaha sebagaimana mestinya.

Ketika peneliti melakukan wawancara terhadap informan, dapat diketahui bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan suatu program yang sangat baik untuk dijalankan karena memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kepala

Desa Pompaniki yang menyatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sangat membantu ekonomi masyarakat miskin. Dengan adanya bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai salah satu program dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) masyarakat akan terbantu untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka.

Dari permasalahan diatas solusi yang diberikan oleh penulis adalah:

1. Pemerintah diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rasa memiliki masyarakat terhadap program dengan cara ikut melakukan pemantauan dan pengawasan partisipatif secara objektif terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat dan dampak positif secara berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam hal pemberian bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan masyarakat yang membutuhkan seperti bedah rumah, pembangunan gedung TK, pengkerikilan jalan, jembatan gantung, sarana air bersih, drainase, dan lain-lain, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diharapkan melakukan evaluasi ulang untuk mengetahui apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran atau tidak.
3. Masyarakat diharapkan menjamin berfungsinya secara berkelanjutan dan menjaga hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa prasarana/sarana, simpan pinjam kelompok perempuan dan usaha ekonomi produktif merupakan aset bagi masyarakat yang harus diawasi, dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari

pemerintah bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian tidak sesuai dengan harapan maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri untuk tahun berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga sasaran di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Dari rumusan masalah yang telah ada dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (X) terhadap peningkatan kesempatan kerja (Y). Dibuktikan dengan lebih besarnya nilai t_{hitung} sebesar $7,332 > t_{tabel}$ sebesar 1,987. Koefisien regresi linear sederhana sebesar 3,775 dengan *Sig.* pada 0,000 dan memiliki sumbangan efektif sebesar 37,7%.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal) dan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP).
3. Permasalahan pokok dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah terletak pada pengembangan usaha ekonomi desa melalui pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi

Produktif) dimana dalam hal pengembalian pinjaman setiap bulannya ada sebagian anggota pemanfaat yang tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu atau terjadinya penunggakan pembayaran sehingga mempersulit anggota pemanfaat lainnya karena pada periode berikutnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan berfikir kembali apakah kelompok UEP (Usaha Ekonomi Produktif) tersebut masih bisa diberi pinjaman atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang kiranya dapat berguna yaitu:

1. Pemerintah diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rasa memiliki masyarakat terhadap program dengan cara ikut melakukan pemantauan dan pengawasan partisipatif secara objektif terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat dan dampak positif secara berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam hal pemberian bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan masyarakat yang membutuhkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diharapkan melakukan evaluasi ulang untuk mengetahui apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran atau tidak.
3. Masyarakat diharapkan menjamin berfungsinya secara berkelanjutan dan menjaga hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa prasarana/sarana, simpan pinjam kelompok perempuan dan usaha ekonomi produktif merupakan aset bagi masyarakat yang harus diawasi, dipelihara,

dikembangkan ,dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian tidak sesuai dengan harapan maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri untuk tahun berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim.
- Apriyanti, Liyana. (2011). Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Christanto, Bram. (2015). Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Semarang. Semarang.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art., 2005).
- Eriasti, Mita. (2010). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Gajah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Ferdinand, Augusty. (2016). Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Jurnal. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Jasuli, Darma, dkk. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan PNPM-MP di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep). Bandung.
- Kusumawardhani, Ellyana. (2014). Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Jurnal. Fakultas PPK_n IKIP Veteran Semarang. Semarang.
- Laporan Koordinasi Program-Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantu Tahun 2013.
- Murbeng, Siaga Basu, dkk. (2011). Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP), Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.

- Marantika, I Putu Agus Adi, dkk. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Jurnal. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Kediri.
- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
- Putra, I GustiPutu. (2015). Efektifitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung. Jurnal. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kediri.
- Pinaria, M. Hendro. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara) UniversitasJember. Jember.
- Pratama, Anggi Wahyu, (2006) Kesempatan Kerja, Blog <http://youcanseemine.blogspot.co.id/2013/04/kesempatan-kerja.html>, (Akses Senin 05 September 2016).
- Qardawi Yusuf. (2001). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Robbani Press. Jakarta.
- Raharjo, Imam Wahyudi. (2009). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bagi Keluarga Miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Rifa'i, Bachtiar. (2013). Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Jurnal. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga. Surabaya.
- Santosa, Widjaya. (2011). Perbandingan Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta. Surakarta.

- Sarsetyono, Y. (2014). Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Masyarakat Semakin Sejahtera di Jawa Tengah. Jurnal. Fakultas PTK Veteran Semarang. Semarang.
- Sukidjo. Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan pada PNPM-Mandiri. Skripsi. Semarang.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Buku. Bandung.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D. Buku. Bandung.
- Syifian Siregar. (2014). Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Buku. Jakarta.
- Tirmidzi Sunan, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Kitab Zuhud*, (Bairat-Libanon : Darul Fikri, 1994 M, Juz 4).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang Undang Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 36.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- Wirawan, I Made Oka. (2015). Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Kerambitan. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia. Singaraja.

